

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pada lembaga amil zakat dan lembaga keuangan syariah yang pesat telah memikat banyaknya pihak untuk mengetahui lebih dalam tentangnya. Di tengah perkembangan yang pesat dari transaksi lembaga syariah, kebutuhan akuntansi syariah semakin meningkat. Akuntansi dalam proses pelaporan transaksi keuangan perusahaan harus dapat melacak seluruh kemajuan transaksi yang sedang berlangsung. Dalam mengelola dana zakat secara profesional dibutuhkan badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan penggalangan dana zakat hingga penyaluran. Semua ketentuan zakat diatur dalam syariah Islam, serta membutuhkan manajer zakat yang harus akuntabel dan transparan. Diharapkan untuk semua pihak agar dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung dalam pengelolaan tersebut (Siti Kholifah,2015).

Untuk membentuk transparansi dalam suatu pengelolaan serta dapat juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan yang lain maka dapat digunakan dengan suatu laporan keuangan. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Agar dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dan terbagi ke dalam sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan merupakan tujuan dari laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi No. 1 (satu).

Laporan keuangan badan amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS). Agar dapat tercapainya suatu laporan keuangan yang akuntabel serta transparan maka dibutuhkan standar akuntansi untuk mengaturnya. Bagi institusi yang didirikan hanya khusus untuk mengelola dan zakat, infak dan sedekah atau bisa juga disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ), maka penyusunan laporan keuangannya menggunakan PSAK No.109, yang mengatur tentang dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya (M. Arif Mufraini dalam Siti Kholifah, 2015).

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109 mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas atau lembaga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar akuntansi yang terdapat dalam PSAK No. 109 menyatakan bahwa laporan keuangan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan setiap organisasi pengelola zakat adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan (Sri Nurhayati dan Wasilah,2015).

Awalnya dalam pelaporan keuangan Badan Amil Zakat di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, akan tetapi seiring dengan perkembangannya Badan Amil Zakat (BAZ) membutuhkan pencatatan yang khusus untuk entitas syariah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah tersebut untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka forum zakat dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Dan pada tahun 2008 PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah mulai diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (Ayu Dian Setyani, 2018).

Kemudian PSAK No. 109 ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009 dan dilakukan revisi pada tahun 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mulai menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat agar dapat mempermudah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi dana ZIS. PSAK No. 109 ditujukan pada entitas atau lembaga syariah yang menerima dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) untuk kegiatan utamanya. Tujuan dilakukan penerapan standar PSAK No. 109 yakni agar dapat memastikan bahwa apakah pada organisasi pengelola zakat tersebut sudah menerapkan prinsip syariah dan seberapa jauh OPZ tersebut memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya (RA. Vidia Gati, 2014).

Masyarakat Sumatera Selatan telah menghimpun dana berupa dana zakat, infak atau sedekah dalam kegiatan operasional BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Setelah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. Untuk melakukan tugas tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya akuntansi zakat yang berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Hal ini perlu dilakukan agar kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bisa mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat serta dapat menilai pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan atas pengelolaan zakat yang dihimpunnya. Sehingga dalam hal itu untuk bisa terlaksananya tujuan dari diberlakukannya PSAK No.109, BAZNAS yang berada di Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan PSAK No.109 agar dapat terciptanya penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dari hasil *interview* penulis kepada Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Bapak Drs. H. Ardi Husin yang bertugas sebagai bagian perencanaan/keuangan dan pelaporan, menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2018 dalam melaporkan laporan keuangan zakat, infak

dan sedekah sudah mengacu pada PSAK No. 109. Berdasarkan penjelasannya, beliau mengatakan laporan keuangan sejak tahun 2018 sudah diaudit langsung dari akuntan publik Jakarta Pusat, yang juga mengeluarkan pernyataannya untuk melakukan pencatatan dengan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam penerapan tersebut baru dilakukan pada tahun 2018 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan agar dapat meninjau kembali apakah dalam penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah diterapkan sepenuhnya atau belum.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sabrina Shahnaz tahun 2016 mengenai penerapan PSAK No.109 dalam pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BAZNAS provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti yakni sama meneliti tentang PSAK No. 109 dan juga menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, pada penelitian sebelumnya mengenai penerapan dari PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis PSAK No. 109 terhadap penyajian laporan keuangan. Penelitian sebelumnya berobjek di BAZ

Provinsi Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan objeknya berada di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kota Palembang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyajian laporan keuangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Karena dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman PSAK No. 109. Maka, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sudah dikatakan efisien dalam suatu kinerjanya. Dengan judul yang penulis ambil yakni **Analisis PSAK No. 109 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah Bagaimana kesesuaian PSAK No. 109 dalam menyajikan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian yang diteliti ini berupa hanya mengenai analisis dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No.109 terhadap penyajian laporan keuangan yang berada di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian PSAK No. 109 dalam menyajikan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dilakukannya penelitian:

1. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengalaman praktis dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat diketahui permasalahan sebenarnya dihadapi dalam praktik serta agar dapat memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bina Darma Palembang.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dijadikan pertimbangan, serta suatu masukan yang berarti bagi staf dan pegawai pada BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan bahwa pentingnya menerapkan PSAK No. 109 dalam

menyajikan laporan keuangan agar dapat menjadi suatu kepercayaan para muzaki dalam menyalurkan dananya.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini nantinya akan disumbangkan kepada Universitas Bina Darma untuk menambah wawasan, bacaan ilmiah serta pengetahuan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Bina Darma Palembang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis atau teratur menurut sistem, terarah dan mempermudah pemahaman tentang masalah yang ada dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab berikut ini, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang yang akan menjelaskan mengenai alasan memilih judul. Bab ini juga menerangkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mengenai penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai objek penelitian, metodologi penelitian, sumber dan tehnik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang terdiri dari sejarah singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, visi dan misi, struktur organisasi, program utama serta tugas dan wewenangnya. Dan akan membahas mengenai permasalahan yang dirumuskan oleh penulis di bab 1 mengenai kesesuaian dari penerapan akuntansi keuangan No. 109 terhadap penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.